Moderasi Beragama di Kalangan Minoritas Muslim di Indonesia

Ali Amran dan Zaim Rais

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan UIN Imam Bonjol
Padang

Email: amranhsbz2@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of religious moderation among Muslim minority communities in Indonesia, particularly in regions where non-Muslims constitute the majority, such as Bali, East Nusa Tenggara, Papua, and North Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach, the research explores the dynamics of religious life among Muslim minorities in practicing their faith, maintaining Islamic identity, and interacting socially with majority communities of different beliefs. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis from various local sources. The findings reveal that Muslim minorities often face several challenges, including social discrimination, restrictions on the construction of places of worship, and intolerant attitudes from segments of the community. In this context, the implementation of religious moderation principles—which include tolerance, non-violence, cultural accommodation, and national unity commitment—is seen as an effective approach to strengthening social cohesion and fostering harmonious coexistence. This study recommends the need for more inclusive, systematic, and context-sensitive public policies to support the sustainable practice of religious moderation. Such efforts are crucial to creating a safe, just, and equitable social space for all religious groups, especially for those in minority positions.

Keywords: *Religious moderation, Muslim minority, Indonesia, Interfaith relations*

Abstrak

Studi ini mengkaji praktik moderasi beragama di kalangan komunitas Muslim minoritas di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang didominasi oleh pemeluk agama lain seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kehidupan keagamaan Muslim minoritas dalam menjalankan keyakinan mereka, mempertahankan identitas keislaman, serta menjalin interaksi sosial dengan komunitas mayoritas di lingkungan yang berbeda keyakinan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dari berbagai sumber lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Muslim minoritas kerap menghadapi sejumlah tantangan, seperti diskriminasi sosial, pembatasan dalam pembangunan tempat ibadah, serta sikap intoleransi dari sebagian masyarakat. Dalam konteks tersebut, implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama—yang meliputi sikap toleran,

penolakan terhadap kekerasan, penerimaan terhadap keragaman budaya, serta komitmen terhadap persatuan bangsa—dipandang sebagai pendekatan efektif untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun kehidupan bersama yang harmonis. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan publik yang lebih inklusif, sistematis, dan kontekstual, guna mendukung praktik moderasi beragama secara berkelanjutan, serta menciptakan ruang sosial yang aman dan adil bagi seluruh umat beragama, terutama bagi kelompok minoritas.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Muslim Minoritas, Indonesia, Hubungan Antaragama

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dikenal dengan keragaman yang kaya dalam hal etnis, agama, dan budaya. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, terdapat beberapa wilayah di mana umat Islam menjadi minoritas. Tinggal di negara yang mayoritas penduduknya Muslim namun menetap di wilayah yang umat Islamnya minoritas menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi komunitas Muslim¹.

Di beberapa wilayah Indonesia, Islam merupakan agama minoritas. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, sekitar sembilan provinsi memiliki populasi Muslim minoritas. Di wilayah-wilayah tertentu yang umat Islamnya minoritas, seperti Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara, umum dijumpai adanya perpindahan agama dari Islam ke Kristen dan sebaliknya².

Selain itu, terdapat berbagai kelompok minoritas yang memeluk agama Islam dengan latar belakang etnis, budaya, dan sejarah yang beragam, sehingga praktik keagamaannya pun berbeda dari umat Islam mayoritas di Indonesia. Moderasi beragama menjadi konsep yang sangat penting dalam konteks keberagaman ini, khususnya bagi umat Islam minoritas di negara yang mayoritas penduduknya Muslim³. Komunitas-komunitas ini sering menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah, mengekspresikan identitas, dan berinteraksi dengan populasi mayoritas, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di bagian timur negara ini.

Hingga saat ini masih sering kita temukan sejumlah oknum yang melakukan bahkan tindakan aksi mendukung kekerasan yang mengatasnamakan agama, simbol keagamaan dibawa-bawa dan dijadikan alasan dalam melakukan aksinya, sehingga citra agama sebagai simbol yang suci menjadi rusak dan hancur. Kita ketahui bahwa pada dasarnya agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia mengajarkan pentingnya kerukunan dan perdamaian dan tidak menolerir

¹ K. M. A. Azani, M. Z., & Harris, "Islam Dan Modernisme Di Indonesia: Tinjauan Atas Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001)," *TSAQAFAH* 15, no. 1 (2019): 147-64.

² Muhammadiyah Darwis Dasopang & Azmil Hasan Lubis, "Perempuan-Perempuan Tangguh Penjaga Nilai-Nilai Islam Anak : Studi Daerah Minoritas Muslim," *KAFI'AH* 11, no. 1 (2021): 2-49.

³ P. Simanjuntak, "Masyarakat Batak Toba Beragama Islam" (Kecamatan Harian, Kabupaten Tapanuli Utara, 2016).

segala bentuk kekerasan. Oknum yang mengatasnamakan agama dengan tujuan untuk melakukan aksi kekerasan itu berarti mereka membelokkan agama yang tidak lagi sesuai dengan yang diajarkan dalam agama dan hal ini akan sangat memungkinkan menjadi sumber awal konflik, sehingga oknum tersebut harus diluruskan pemahamannya dan dibina keberagamaannya.⁴

Di berbagai daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara, komunitas Muslim hidup sebagai minoritas dalam lingkungan sosial yang didominasi oleh penganut agama lain. Kondisi ini memunculkan tantangan tersendiri dalam menjalankan ajaran agama, mempertahankan identitas keislaman, dan membangun relasi sosial yang harmonis. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip moderasi beragama seperti toleransi, sikap anti-kekerasan, penghormatan terhadap budaya lokal, dan komitmen kebangsaan menjadi sangat penting dan relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana moderasi beragama dipraktikkan oleh Muslim minoritas dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta bagaimana mereka menavigasi identitas keagamaan dalam konteks sosial yang pluralistik dan penuh tantangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pengalaman dan dinamika moderasi beragama di kalangan minoritas Muslim yang tinggal di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara. Subjek penelitian mencakup minoritas Muslim, tokoh lintas agama, dan pejabat pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman para subjek, observasi partisipatif terhadap praktik moderasi beragama, serta dokumentasi dalam bentuk laporan atau arsip terkait. Analisis dilakukan dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi tantangan, respons dari komunitas mayoritas, dan implementasi kebijakan yang relevan⁵. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, sementara temuan penelitian

⁴ Darmayanti and Maudin, "Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial," *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 40–51.

⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada, 2008).

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan harmoni dan toleransi melalui moderasi beragama.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minoritas Muslim di Tengah Mayoritas Muslim di Indonesia

Dinamika minoritas dan mayoritas merupakan aspek yang melekat dalam struktur sosial suatu bangsa. Dalam kenyataannya, kelompok minoritas sering kali mengalami perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dominan, serta merasa menjadi sasaran diskriminasi kolektif. Keberadaan minoritas sangat terkait dengan kelompok dominan yang menikmati status sosial dan hak istimewa yang lebih tinggi. Foucault menyatakan bahwa istilah “minoritas” digunakan untuk membedakan karakteristik kelompok atau etnis yang mengalami subordinasi oleh kelompok lain.⁷

Istilah "minoritas" dan "mayoritas" merupakan dua hal yang berlawanan, dan kerap digunakan untuk menggambarkan dikotomi dalam hal ras, agama, etnis, kebangsaan, atau kelompok yang terpengaruh oleh entitas yang lebih kuat. Minoritas umumnya merujuk pada kelompok yang mengalami ketimpangan sosial dan diskriminasi kolektif di wilayah tertentu.⁸

Menurut Barton Myers, hakikat kelompok minoritas tidak hanya menyangkut jumlah secara kuantitatif, melainkan juga berkaitan dengan persepsi tentang superioritas. Konsep ini melibatkan prasangka terselubung yang menguasai struktur sosial. Penekanan pada angka semata tidak memiliki dasar yang kuat dan berisiko menyebabkan ketimpangan serta kesalahpahaman historis-sosiologis.⁹

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2011).

⁷ Indriani Kartini, *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim Di Bali* (Bali: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011).

⁸ Tri Nuke Pudjiastuti, *Problematika Minoritas Muslim Di Filipina, Thailand, Dan Myanmar: Catatan Pendahuluan, Dalam Riza Sihbudi (Ed), Problematika Minoritas Muslim Di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, Dan Rohingya*. (Jakarta: PPW-LIPI, 2000).

⁹ Indriani Kartini, *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim Di Bali*.

Konsep minoritas rasial sudah muncul sejak era rasisme ilmiah pada tahun 1775, yang membandingkan ras Eropa dengan ras Afrika, dengan bias yang mengunggulkan fisik, kecerdasan, dan etos kerja Eropa. Pada tahun 1779, Blumenbach mengklasifikasikan umat manusia ke dalam lima ras. Puncaknya terjadi pada tahun 1834 melalui rasisme ilmiah Morton yang mengurutkan ras berdasarkan ukuran tengkorak, memperkuat ideologi diskriminatif dari abad ke-17 hingga ke-19.¹⁰

Dalam konteks minoritas agama, diskriminasi dalam menjalankan keyakinan seringkali memicu konflik antaragama yang serius. Minoritas agama bisa merasa terpinggirkan sebagai warga negara kelas dua karena pengakuan yang tidak setara. Namun, keyakinan agama bersifat personal dan tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, promosi nilai pluralisme dipandang sebagai cara efektif untuk meredam konflik antaragama.¹¹

Sementara itu, kelompok minoritas penyandang disabilitas, sebagaimana dicatat oleh Wood¹² menghadapi keterbatasan fisik yang menghambat partisipasi sosial mereka, sehingga semakin terpinggirkan. Jamal al-Din Athiyah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi mendefinisikan minoritas sebagai kelompok yang: (1) jumlahnya lebih kecil, (2) tidak memiliki kekuasaan dan membutuhkan perlindungan hak, serta (3) memiliki karakteristik yang membedakannya dari mayoritas berdasarkan kelompok, etnis, budaya, bahasa, atau agama.

Minoritas Muslim disatukan oleh identitas keagamaan yang sama, yakni Islam. Menurut Taj al-Sirr Ahmad Harran, mereka adalah kelompok Muslim yang tinggal di bawah pemerintahan non-Muslim, di mana Islam bukanlah dasar hukum,

¹⁰ Zainul Hasani Syarif, *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas (Eksistensi, Kontestasi Dan Korvergensi)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021).

¹¹ Ahmad Yasri Huda, "Islam Dan Kaum Minoritas Di Indonesia," *Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 74.

¹² L Wood, *Media Representation of Disabled People: A Critical Analysis Overview of the Media Diu* (Jakarta: Alfabeta, 2006).

budaya, maupun mayoritas penduduk.¹³ Sebagai kelompok minoritas, umat Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim menghadapi diskriminasi dan stereotip, yang menciptakan isolasi dan hambatan sosial, serta dapat menghambat kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip moderasi. Ibadah secara terbuka atau perayaan Islam bisa menjadi tantangan ketika norma agama mayoritas mendominasi ruang publik. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam juga menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan.

Beberapa kelompok Muslim minoritas merasa terdorong untuk menegaskan identitas Islam mereka secara lebih kuat, yang bisa memicu konflik atau kesalahpahaman dalam hubungan antarumat beragama. Realitas sosial menunjukkan berbagai permasalahan seperti kesulitan mendirikan rumah ibadah, konflik saat pelaksanaan ibadah, ketegangan sosial, dan kurangnya toleransi dari kelompok mayoritas.

Dukungan pemerintah yang terbatas dalam hal fasilitas keagamaan atau pendidikan Islam memperparah tantangan ini, sehingga kelompok Muslim minoritas tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan keyakinannya. Kajian tentang moderasi beragama di kalangan Muslim minoritas sangat relevan saat ini, terutama dalam bidang pariwisata, pendidikan, dan kebijakan publik. Misalnya, pariwisata di daerah mayoritas non-Muslim seperti Bali atau Nusa Tenggara Timur dapat diuntungkan dengan akomodasi bagi wisatawan Muslim. Dalam bidang pendidikan, pemahaman tentang moderasi beragama membantu pengembangan kurikulum yang inklusif dan mendorong toleransi. Kebijakan publik juga dapat memanfaatkan wawasan ini untuk mendukung keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

Moderasi Beragama di Kalangan Minoritas Muslim di Indonesia

Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap keagamaan yang moderat dalam menjalankan ajaran agama serta mampu mengakomodasi

¹³ Zunly Nadia, "Borneo : Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa Pemikiran Thariq Muhammad Dalam Menegakkan Identitas Muslim Bercita Rasa Eropa," *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45.

keberagaman agama di Indonesia. Konsep ini berakar pada istilah *wasathiah* atau *wasathan*, yang berarti berada di tengah, seimbang, atau adil. Istilah lain yang berkaitan adalah *tawassuth* (moderasi), *i'tidal* (keadilan), dan *tawazun* (keseimbangan).¹⁴

Moderasi beragama menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, dengan tujuan membangun harmoni sosial. Di Indonesia, konsep ini telah banyak dikampanyekan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Namun, penerapannya di kalangan Muslim minoritas menghadirkan tantangan tersendiri. Misalnya, Muslim minoritas di daerah seperti Bali, Papua, dan Nusa Tenggara Timur sering kali harus menyesuaikan diri dengan norma dan budaya mayoritas non-Muslim, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka.

Moderasi menolak sikap keras dan ekstrem. Khaled Abou El Fadl menggambarkan moderasi sebagai kebalikan dari arogansi, intoleransi, dan merasa paling benar sendiri. Seorang yang moderat menolak otoritarianisme dan membangun hubungan harmonis antarmanusia. Moderasi sejalan dengan prinsip *al-tawassut* (keseimbangan) dan *al-i'tidal* (keadilan).¹⁵

Moderasi beragama juga mencerminkan konsep *tawasut* dalam bahasa Arab, yaitu sikap yang menghindari kecenderungan ekstrem maupun lemah, dan lebih mengutamakan kemaslahatan umum. Karakter Islam ini sangat selaras dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal (Syarif & Hannan, 2020).

Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama melalui sembilan indikator utama: kemanusiaan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, kepatuhan konstitusional, komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi (Sinaga, 2022).

¹⁴ Dwi Fitriatun Aisyah, "Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Di Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁵ Muhammad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.

Namun, indikator utamanya adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi budaya (Junaedi, 2019).

Islam mengajarkan *tasamuh* (toleransi), menghormati keberagaman pemikiran, serta perilaku yang menjaga norma sosial dan keagamaan. Moderasi Islam memperkuat prinsip teologis dan sosiologis untuk mencapai tujuan universal Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) (Huriyah et al., 2020).

Moderasi merupakan bagian dari prinsip Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu komunitas yang adil. Prinsip ini menghindari bias dan diskriminasi serta mendorong kasih sayang, pengampunan, dan toleransi terhadap perbedaan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Shihab, 2019).

Sejak tahun 2018, di bawah Menteri Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama menjadi program prioritas Kementerian Agama. Pada tahun 2019, konsep ini dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Tujuannya adalah memperkuat ajaran agama, menghindari ekstremisme, dan melawan radikalisme (Link Website).

Keberagaman budaya dan agama di Indonesia tercermin dalam semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika”. Moderasi beragama berperan penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan minoritas Muslim seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Komunitas ini kerap menghadapi intoleransi, keterbatasan akses tempat ibadah, dan kesulitan dalam mendirikan fasilitas keagamaan.

Minoritas Muslim di Bali dan Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serupa, seperti penolakan sosial dan terbatasnya sarana ibadah serta pendidikan. Di Papua, insiden seperti serangan Tolikara tahun 2015 menunjukkan masih adanya ketegangan antaragama.

Moderasi beragama dapat menjawab tantangan tersebut melalui kerangka kerja yang dibangun atas empat pilar: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi budaya. Kerangka ini bertujuan menyeimbangkan ancaman ekstremisme dan liberalisme, serta membangun harmoni dalam masyarakat yang beragama.

Empat Pilar Implementasi Moderasi Beragama

1. Komitmen Kebangsaan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman dalam mendorong moderasi beragama. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mencerminkan komitmen nasional dalam menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat harus menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap keyakinan orang lain untuk mencegah diskriminasi dan marginalisasi.¹⁶

Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif agar semua agama dan kepercayaan dapat berkembang secara damai. Pendidikan kewarganegaraan yang inklusif merupakan salah satu cara mengenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda belajar menghargai perbedaan dan menjaga harmoni antarumat beragama.¹⁷

Contoh konkret komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama antara lain perayaan hari besar seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi yang diselenggarakan baik di daerah mayoritas Muslim maupun minoritas. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengadakan kegiatan lintas iman untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kebanggaan akan keberagaman Indonesia. Selain itu, penyediaan rumah ibadah yang adil dan representatif bagi semua agama menunjukkan komitmen kebangsaan. Setiap agama harus mendapat kesempatan yang sama dalam mendirikan tempat ibadah sesuai kebutuhannya. Pemerintah juga

¹⁶ Dicky Eko Prasetyo, “Pancasila : Jurnal Keindonesiaan,” *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 1–10.

¹⁷ *Jurnal Internasional and Berbahasa Indonesia*, “Bhinneka Tunggal Ika : Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia” 1, no. 1 (2024).

aktif mengawasi dan memastikan pembangunan rumah ibadah tidak memicu konflik antarumat beragama.¹⁸

Komitmen kebangsaan juga mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas dan aliran kepercayaan yang kurang dikenal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan ruang yang cukup agar mereka dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Edukasi dan sosialisasi tentang keberagaman agama penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Media dan platform digital berperan penting dalam menyebarkan pesan moderasi beragama sebagai bentuk komitmen kebangsaan. Platform ini harus menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan mengedepankan pesan toleransi dan harmoni, agar masyarakat lebih terdidik dan sadar akan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan bersama.¹⁹

2. Toleransi

Toleransi adalah kunci dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Toleransi tidak hanya berarti saling menghormati, tetapi juga bekerja sama dan saling mendukung dalam menciptakan suasana damai. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian atau kekerasan, oleh karena itu setiap individu harus menahan diri dari prasangka dan kebencian. Menurut Rasyidi, toleransi adalah konsekuensi logis dari kesadaran akan adanya perbedaan agama. Mengakui kenyataan ini menuntut adanya toleransi sejati dalam perkataan dan tindakan. Kesepakatan sejarah seperti Edict of Nantes dan Perjanjian Westphalia menunjukkan pentingnya toleransi dalam mengakhiri konflik agama.²⁰

Toleransi dalam moderasi beragama mencakup penghargaan terhadap keyakinan orang lain dan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan agama tanpa rasa takut atau tekanan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung

¹⁸ Zahrotun Nikmah et al., "Exploring Religious Moderation through the Lens of Pancasila's First Precept: Insights from the 2024 Collaborative KKN Program," no. 1 (2024): 152–58.

¹⁹ Deni Puji Utomo and Rachmat Adiwijaya, "Representasi Moderasi Beragama Dalam Dakwah Habib Husein Ja'far Al-Hadar Pada Konten Podcast Noice 'Berbeda Tapi Bersama,'" *Pusaka* 10, no. 1 (2022): 212–23, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.675>.

²⁰ Imam Malik, Khoirul Anam, and Sukron Ma'mun, "Online Radicalism, When Online Surfing Leads to Suffering," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2020): 109–18, <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2198>.

pertumbuhan dan memperkaya keberagaman masyarakat. Contoh nyata toleransi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, seperti saat umat agama lain ikut memberi ucapan dan dukungan saat Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga sebaliknya saat Natal, Waisak, atau Nyepi. Toleransi juga mencakup penghormatan terhadap perbedaan tradisi dan tata cara ibadah. Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah yang berbeda, seperti masjid, gereja, pura, atau vihara, menjaga kebersihan, ketenangan, dan menghindari gangguan saat ibadah berlangsung.²¹ Perkawinan beda agama yang dilakukan dengan saling menghormati juga merupakan bentuk toleransi. Keluarga dan masyarakat mendukung keputusan pasangan sambil tetap mempertahankan keyakinan masing-masing, dan merayakan persatuan dalam perbedaan.

3. Anti-Kekerasan

Moderasi beragama mengajarkan untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Agama seharusnya menjadi sarana perdamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat harus memerangi radikalisme dan intoleransi yang mengganggu keharmonisan sosial. Menghindari kekerasan dalam praktik keagamaan adalah aspek penting dari moderasi.

Semua persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah antarwarga. Implementasi moderasi anti-kekerasan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menangani potensi konflik antaragama. Pendekatan preventif dan persuasif sangat penting untuk menyikapi isu sensitif dengan bijak dan mementingkan kepentingan bersama. Pendidikan memegang peran vital dalam menyemai nilai anti-kekerasan. Pendidikan yang inklusif dan mengajarkan toleransi serta keberagaman sejak dini membentuk individu yang damai dan menghargai sesama.²²

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Urban Farming: Inovasi Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Dan Membangun Kehidupan Yang Lebih Sehat Di Perkotaan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

²² Susanti, "Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural," *Tajdid* 6, no. 2 (2022): 168–82.

Kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama juga mendukung kerukunan di lingkungan sekolah. Media dan platform digital juga berperan dalam upaya anti-kekerasan. Mereka harus menyajikan informasi agama secara berimbang dan akurat, serta menghindari berita provokatif. Media sosial harus digunakan secara bijak untuk menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan atas nama agama. Dengan mengedepankan moderasi anti-kekerasan, masyarakat dapat hidup damai dan harmonis dalam keberagaman.

4. Akomodasi dan Penerimaan Tradisi dan Budaya

Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Moderasi beragama mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tersebut. Sebagai bangsa besar, Indonesia harus merangkul keberagaman, bukan menciptakan perpecahan, demi menjaga keharmonisan dan persatuan nasional. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, dengan 1.340 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Keanekaragaman ini tidak hanya terdapat di dalam negeri, tetapi juga memiliki resonansi global.

Penerimaan tradisi dan budaya dalam moderasi beragama mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap cara ibadah, adat istiadat, dan tradisi yang beragam. Praktik keagamaan sering kali terjalin erat dengan budaya lokal, sehingga memperkaya semangat inklusif dan toleran dari moderasi beragama.²³ Contohnya adalah perayaan Waisak di Borobudur yang memadukan ritual Buddhis dengan budaya Jawa, atau perayaan Nyepi di Bali yang menggabungkan ajaran Hindu dengan kearifan lokal. Perayaan Cap Go Meh di Singkawang melibatkan banyak unsur lintas agama, menciptakan saling pengertian dan menjaga budaya lokal. Kampanye pendidikan dan kesadaran akan keberagaman budaya mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan praktik keagamaan dan budaya. Pendekatan ini membantu menciptakan harmoni dan persatuan di tengah

²³ H. M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974).

perbedaan. Pemerintah dan tokoh agama perlu memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya, membangun kesepahaman tentang pentingnya mengakomodasi dan melestarikan keberagaman budaya. Dengan memegang teguh empat pilar moderasi beragama ini, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam bangsa yang majemuk.²⁴

Beberapa Kasus Negatif yang Dialami oleh Minoritas Muslim di Sulawesi Utara, Papua, Kupang (NTT), dan Bali. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan sosial, budaya, dan keagamaan yang dihadapi umat Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim:

1) Sulawesi Utara

Mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, membuat Muslim menjadi minoritas.

- a) *Penolakan pembangunan masjid*: Komunitas lokal menolak pembangunan masjid dengan alasan kekhawatiran terhadap perubahan sosial dan budaya.
- b) *Diskriminasi sosial*: Muslim pendatang sering menghadapi stereotip negatif dan perlakuan tidak adil, terutama dalam pekerjaan dan pergaulan sosial.
- c) *Ketegangan keagamaan*: Terdapat laporan konflik kecil terkait perayaan agama atau penggunaan ruang publik untuk kegiatan keagamaan Islam.

2) Papua

Penduduk mayoritas Kristen menjadikan Muslim sebagai minoritas.

- a) *Insiden Tolikara 2015*: Serangan terhadap Muslim yang melaksanakan salat Id, mengakibatkan kerusakan properti seperti kios dan masjid.
- b) *Stigma terhadap pendatang*: Muslim sering dianggap sebagai pendatang yang mengambil peluang ekonomi lokal, memicu ketegangan dengan masyarakat asli Papua.

²⁴ Aliva Safira, "Pandangan Tentang Keragaman Budaya Indonesia Di Negara Lain," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 1, no. 6 (2024): 57.

- c) *Pembatasan aktivitas keagamaan*: Sulit mendapatkan izin pembangunan masjid atau kegiatan keagamaan terbuka.

3) Kupang (NTT)

Mayoritas Katolik dan Kristen Protestan, Muslim adalah minoritas kecil.

- a) *Kesulitan mendirikan masjid*: Terdapat penolakan dari masyarakat lokal terhadap pembangunan masjid atau lembaga pendidikan Islam.
- b) *Ketegangan sosial*: Muslim sering dianggap sebagai pendatang atau kelompok budaya yang berbeda, menghambat integrasi sosial.
- c) *Penolakan perayaan Islam*: Umat Islam kesulitan menggelar perayaan besar seperti Idul Fitri di ruang publik.

4) Bali

Mayoritas Hindu, dengan tantangan khas bagi minoritas Muslim.

- *Pembatasan azan dengan pengeras suara*: Beberapa wilayah melarang penggunaan pengeras suara karena dianggap mengganggu tradisi lokal.
- *Kesulitan membangun masjid*: Pendirian masjid sering mendapat penolakan, meski populasi Muslim cukup signifikan.
- *Intoleransi terhadap perayaan Islam*: Umat Muslim kadang harus menyesuaikan diri dengan tradisi Hindu lokal yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah.

Kasus-kasus ini mencerminkan kompleksitas interaksi lintas budaya dan lintas iman di wilayah mayoritas non-Muslim. Meskipun pemerintah dan masyarakat berupaya membangun harmoni melalui program moderasi beragama, persoalan seperti diskriminasi, stereotip, dan keterbatasan akses masih perlu diselesaikan melalui dialog antaragama, kebijakan inklusif, dan penghormatan terhadap keberagaman

D. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Minoritas Muslim terdapat di sembilan provinsi di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Minoritas umumnya merujuk pada kelompok yang mengalami ketimpangan sosial dan kerap menghadapi diskriminasi kolektif di lokasi tertentu. Fakta menunjukkan bahwa minoritas Muslim di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalankan ajaran agamanya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kondisi semacam ini seharusnya tidak terjadi, dan solusinya terletak pada implementasi program moderasi beragama yang tepat.

Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan untuk menjunjung tinggi keberagaman, toleransi yang menghormati perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Implementasi moderasi beragama di wilayah minoritas Muslim di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Meskipun dapat diwujudkan, masih banyak hambatan yang dihadapi, sebagaimana lazimnya terjadi pada kelompok minoritas yang kerap menemui sikap yang kurang menguntungkan. Idealnya, penerapan moderasi beragama di komunitas manapun harus sejalan dengan implementasinya di wilayah mayoritas Muslim di Indonesia. Hal ini berlaku setara, baik dalam konteks minoritas maupun mayoritas, dengan tetap mengacu pada empat pilar moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Dwi Fitriatun. "Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Di Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Aliva Safira, dkk. "Pandangan Tentang Keragaman Budaya Indonesia Di Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 1, no. 6 (2024): 57.
- Azani, M. Z., & Harris, K. M. A. "Islam Dan Modernisme Di Indonesia: Tinjauan Atas Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001)." *TSAQAFAH* 15, no. 1 (2019): 147–64.
- Darmayanti, and Maudin. "Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial." *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 40–51.
- Fahri, Muhammad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.
- H. M. Rasjidi. *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- Huda, Ahmad Yasri. "Islam Dan Kaum Minoritas Di Indonesia." *Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 74.
- Indriani Kartini. *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim Di Bali*. Bali: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011.
- Internasional, Jurnal, and Berbahasa Indonesia. "Bhinneka Tunggal Ika : Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia" 1, no. 1 (2024).
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada, 2008.
- Malik, Imam, Khoirul Anam, and Sukron Ma'mun. "Online Radicalism, When Online Surfing Leads to Suffering." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2020): 109–18. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2198>.
- Muhammadi Darwis Dasopang & Azmil Hasan Lubis. "Perempuan-Perempuan Tangguh Penjaga Nilai-Nilai Islam Anak : Studi Daerah Minoritas Muslim." *KAFI'AH* 11, no. 1 (2021): 2–49.
- Nikmah, Zahrotun, M Nasyat Fayyadh U, Naufan Sadida Rashif, and M Zaenaal. "Exploring Religious Moderation through the Lens of Pancasila ' s First Precept : Insights from the 2024 Collaborative KKN Program," no. 1 (2024): 152–58.

- Prasetyo, Dicky Eko. "Pancasila : Jurnal Keindonesiaan." *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 1–10.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. *Problematika Minoritas Muslim Di Filipina, Thailand, Dan Myanmar: Catatan Pendahuluan, Dalam Riza Sihbudi (Ed), Problematika Minoritas Muslim Di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, Dan Rohingya*. Jakarta: PPW-LIPI, 2000.
- Simanjuntak, P. "Masyarakat Batak Toba Beragama Islam." Kecamatan Harian, Kabupaten Tapanuli Utara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Susanti. "Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural." *Tajdid* 6, no. 2 (2022): 168–82.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *URBAN FARMING: INOVASI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN DAN MEMBANGUN KEHIDUPAN YANG LEBIH SEHAT DI PERKOTAAN. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Utomo, Deni Puji, and Rachmat Adiwijaya. "Representasi Moderasi Beragama Dalam Dakwah Habib Husein Ja'far Al-Hadar Pada Konten Podcast Noice 'Berbeda Tapi Bersama.'" *Pusaka* 10, no. 1 (2022): 212–23. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.675>.
- Wood, L. *Media Representation of Disabled People: A Critical Analysis Overview of the Media Diu*. Jakarta: Alfabeta, 2006.
- Zainul Hasani Syarif. *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas (Eksistensi, Kontestasi Dan Korvergensi)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Zunly Nadia. "Borneo : Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa Pemikiran Thariq Muhammad Dalam Menegakkan Identitas Muslim Bercita Rasa Eropa." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45.